

SEKTOR HULU



Foto : Penyediaan daun murbei yang bebas pestisida sebagai pakan ulat sutra merupakan komponen penting di hulu industri sutra.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sulawesi Selatan tengah mengalami penurunan drastis jumlah pelaku industri sutra di sektor hulu, para petani pembudidaya murbei dan ulat sutra. Mereka yang tersisa didominasi oleh perempuan berusia tua dan berpendidikan rendah. Gabungan sejumlah faktor yang saling terhubung menggerakkan kecenderungan ini. Pertama, ketergantungan terhadap bibit impor dengan kualitas yang inkonsisten, kegagalan beruntun yang memaksa petani beralih komoditas,

dan penggunaan pestisida di kawasan pemeliharaan ulat sutra. Kedua, rangkaian kebijakan pemerintah lebih berfokus pada perbaikan teknis yang bertujuan memacu produksi komoditas—lebih gencar dalam dua tahun terakhir, ketimbang petani yang terlibat di dalamnya. Akhirnya, ketiga, tampak fragmentasi pada sejumlah lembaga pemerintah yang mengurangi keluwesan dalam mengatasi isu-isu yang dihadapi petani, yang sering kali melintasi batas-batas kelembagaan; dan perubahan struktur kelembagaan

yang terus berlangsung menghambat kerja-kerja berjangka panjang. Untuk mengatasi rangkaian persoalan ini dibutuhkan upaya untuk (i) memproduksi telur ulat sutra nasional yang berkualitas dan adaptif di Sulawesi Selatan, mudah diakses dan dirawat

oleh petani, serta berkelanjutan, diiringi (ii) perbaikan sistem deteksi dini penyakit ulat sutra, dan (iii) penguatan kelembagaan petani yang kini masih lemah dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kokon.

SURUTNYA SUTRA SULAWESI SELATAN

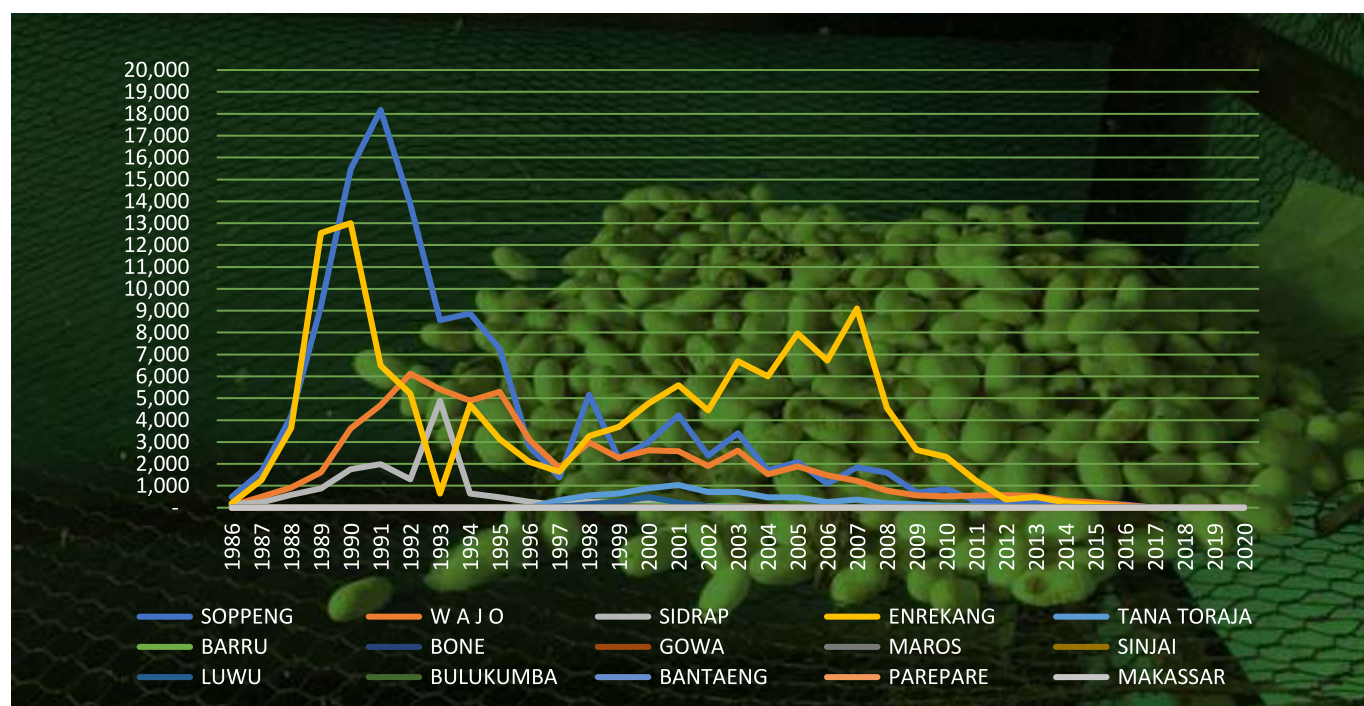
Policy Brief ini merupakan bagian dari seri *Policy Brief* tentang rantai nilai sutra Sulawesi Selatan, dengan judul '**Mengembalikan Kejayaan Sutra Sulawesi Selatan**', terdiri dari empat bagian :

1. Sektor Hulu,
2. Sektor Manufaktur,

3. Sektor Hilir, dan
4. Lintas Sektor.

Seri *Policy Brief* ini dirumuskan berdasarkan kajian yang dilakukan Agustus 2020-Januari 2021 oleh Tim Pelaksana Kajian, sebagai bagian dari uji coba penyusunan kebijakan berdasarkan kajian atau *Knowledge to Policy* (K2P), kerja

GRAFIK 1 Realisasi Penjualan Telur Ulat Sutra (dalam unit Box) PERHUTANI dalam Wilayah Sulawesi Selatan (1986-2020)



SEKTOR HULU

sama antara Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, *Knowledge Sector Initiative* (KSI), Yayasan BaKTI, dan Payo-Payo.

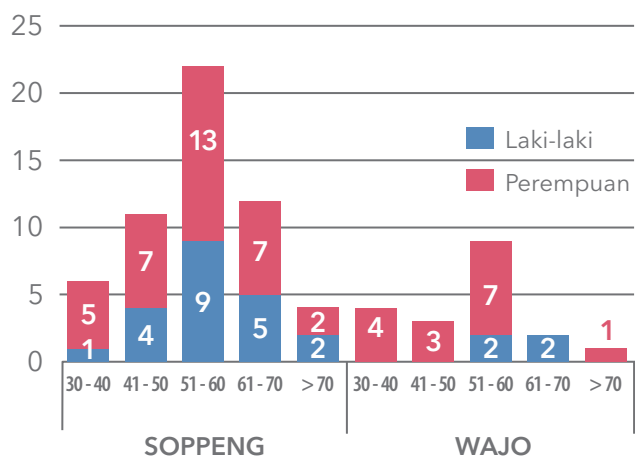
Produk-produk sutra Sulawesi Selatan pernah mencapai masa jaya ketika provinsi ini menjadi penyumbang 70-80 persen sutra nasional. Di samping nilai kultural, komoditas ini juga memberi manfaat lingkungan dalam bentuk rehabilitasi lahan, serta manfaat ekonomi kepada para pelaku (Sadapotto 2010), terutama perempuan yang merupakan pelaku utama dan dominan dalam keseluruhan rantai nilai sutra Sulawesi Selatan.

Kajian yang dilaksanakan oleh tim akademisi, peneliti pemerintah dan aktivis Ornop menyingkap bahwa Sulawesi Selatan tengah mengalami penurunan drastis jumlah pelaku di

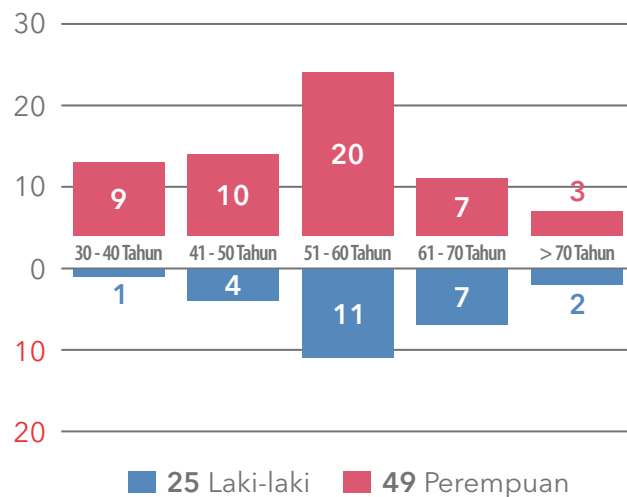
sektor hulu. Jumlah petani pembudidaya murbei dan ulat sutra melorot tajam, kini hanya tersisa 75 petani, tersebar di Kabupaten Soppeng (56 orang) dan Wajo (19 orang). Sementara pelaku di Kabupaten Enrekang yang dulu cukup banyak kini telah habis. Sebagian besar pelaku yang tersisa adalah perempuan (75%), berusia tua (67% petani berusia 51 tahun ke atas), dan berpendidikan rendah (sekitar 46% persen berpendidikan SD, sebagian tidak tamat, 15% SMP, 34% SMA, dan hanya 5% sarjana).

Isu-isu di level petani ini berjalan beriringan dengan merosotnya penjualan bibit ulat sutra oleh Perum Perhutani. Gabungan sejumlah faktor yang saling terhubung menggerakkan kecenderungan ini.

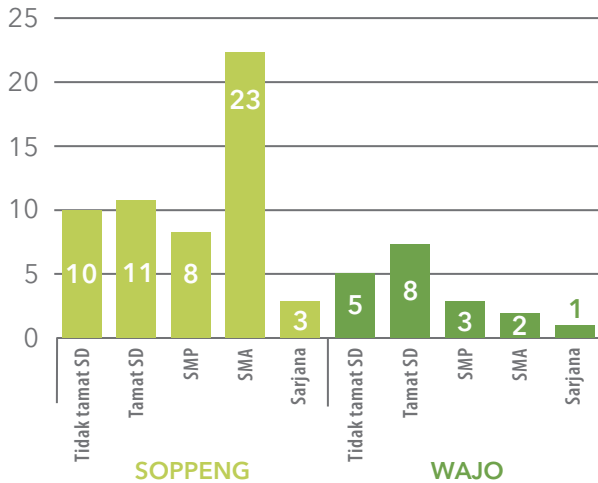
GRAFIK 2 Pelaku Sektor Hulu Sutra Menurut Gender dan Wilayah di Sulawesi Selatan



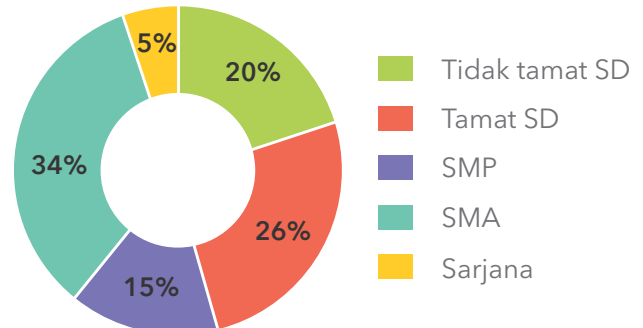
GRAFIK 3 Pelaku Sektor Hulu Sutra Menurut Gender dan Umur di Sulawesi Selatan



GRAFIK 4 Jumlah Pelaku Sektor Hulu Sutra Menurut Pendidikan dan Wilayah di SulSel



GRAFIK 5 Proporsi Pelaku Sektor Hulu Sutra Menurut Pendidikan di SulSel



KETERGANTUNGAN BIBIT IMPOR DAN USAHA PETANI

“Kami berhenti pelihara ulat karena ulatnya selalu busuk hingga berakhir gagal panen berkali-kali. Terakhir memelihara sudah lupa kapan. Andai saja ulatnya bagus, mungkin kami masih memelihara sampai sekarang karena panennya setiap bulan.”

**Petani perempuan sepuh,
Kel. Walennae, Kab. Wajo**

Susutnya sektor hulu sutra ini berasal dari gabungan dari sejumlah faktor. Pertama, ketergantungan terhadap bibit ulat sutra impor, yang ketika mengalami penurunan produktivitas, sektor ini menjadi surut, sebagaimana terlihat

pada penurunan jumlah pelaku dan penjualan bibit.

Kedua, kegagalan beruntun, antara lain akibat penyakit *pebrine*, membuat petani mulai menghitung perimbangan antara jerih payah (*drudgery*) dan manfaat (*utility*) (Ploeg 2013). Ketika mereka menemukan bahwa jerih payah sudah jauh melebihi manfaat, mereka pun mengalihkan investasi ke komoditas atau pekerjaan lain. Mengingat secara kultural para lelaki dianggap sebagai pencari nafkah utama, dapat dikatakan bahwa sektor ini telah mengalami degradasi, menjadi pilihan terakhir dalam strategi penghidupan keluarga tani, menjadi nafkah cadangan atau tambahan.

SEKTOR HULU

Ketiga, apabila peralihan komoditas ini berlangsung cukup meluas, satu kawasan bisa berhenti mengusahakan sutra sama sekali. Penggunaan pestisida yang bisa membunuh ulat sutra dengan mudah, sebagaimana terjadi di Enrekang dan Wajo.

Kecenderungan ini terjadi sekalipun petani mengakui bahwa memelihara ulat adalah pekerjaan yang menguntungkan. Usaha tani ini sangat ramah petani kecil, termasuk perempuan kepala keluarga, bisa dimulai dengan modal kecil atau tanpa modal,

kebutuhan tenaga kerja lebih ringan, tidak selalu butuh lahan yang luas (petani yang masih aktif rerata memiliki lahan di bawah 1 hektare), dan bisa mendatangkan pendapatan yang relatif teratur dalam waktu lebih cepat (28 hari). Karena itu, surutnya pemeliharaan ulat sutra dapat dilihat sebagai dinamika dalam rentang strategi penghidupan para pelaku di hulu. Mereka bisa saja kembali mengusahakan sutra ketika ulat sutra yang bermutu baik kembali tersedia.

KEBIJAKAN FOKUS PADA PRODUKSI KETIMBANG MANUSIA

Kebijakan masih lebih berfokus pada perbaikan barang komoditas, ketimbang manusia (petani) yang terlibat pada rantai nilai sutra. Anggaran untuk persuteraan di Sulawesi Selatan secara umum meningkat pesat pada 2019-2020. Akan tetapi, rentetan kegiatan yang menyusulnya lebih banyak untuk peningkatan produksi bahan mentah semisal bantuan bibit murbei dan ulat sutra (termasuk impor), dan nyaris seluruhnya berlangsung tanpa persiapan sosial yang memadai. Bantuan juga diarahkan ke pelatihan-

pelatihan untuk menambah keterampilan teknis petani, dan nyaris tidak tampak upaya untuk benar-benar memberdayakan petani—pelaku utama yang mentransformasi bibit ulat menjadi menjadi kokon. Bahkan arah kebijakan seperti ini dapat merusak mata rantai komoditas itu sendiri. Misalnya, kebijakan mempermudah prosedur impor diiringi menghilangnya fungsi badan pemerintah yang bertugas mendeteksi penyakit ulat di daerah-daerah yang membuat ancaman penyakit terus mengintai.

FRAGMENTASI DAN LEMBAGA YANG TERUS BERUBAH

Tampak beberapa persoalan kelembagaan di institusi pemerintah terkait. Pertama, fragmentasi pembagian mandat organisasi-organisasi pemerintah terkait yang mengurus persuteraan membuat kerja dinas-dinas tersebut kurang fleksibel menangani isu-isu yang berada di luar mandat masing-masing. Kedua, institusi pemerintah terus melakukan perubahan struktur kelem-

bagaan dan menghambat keberlanjutan kerja-kerja berjangka panjang. Perubahan struktur dinas-dinas juga mengalihkan sumberdaya di kabupaten menjauh dari persoalan yang dihadapi sektor hulu.

Untuk mengatasi rangkaian persoalan di atas, beberapa langkah strategis perlu dijalankan.

REKOMENDASI: MENGEMBALIKAN KEJAYAAN SUTRA DI SEKTOR HULU

1. Produksi telur ulat sutra nasional

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bibit ulat impor, dibutuhkan produksi telur ulat sutra nasional berkualitas, mudah diakses dan dirawat petani, serta berkelanjutan. Upaya ini bisa dilakukan lewat dua cara:

- ▶ Menjalani kerja sama dengan Badan Litbang Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bogor, untuk melaksanakan uji adaptasi dalam rangka menemukan galur ulat sutra yang paling adaptif untuk Sulawesi Selatan. Kerja sama dengan institusi-

insititusi penelitian relevan di Sulawesi Selatan untuk uji adaptasi bibit F1 (indukan) unggulan Sulsel. Untuk upaya ini dibutuhkan revitalisasi institusi (bila sudah ada, semisal Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae atau pusat *breeding* Sulsel dan penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas *breeder*.

- ▶ Pengadaan institusi yang mengelola fasilitas produksi telur ulat sutra dan tenaga pendukungnya. Unit ini akan bertugas memelihara dan menyediakan bibit ulat setidaknya sampai instar 3 (usia ulat sekitar 12 hari), demi memastikan produksi/kualitas

kokon yang baik di tingkat petani. Program yang dibutuhkan ialah reposisi staf yang akan mengelola fasilitas *breeder*, di KPH Walanae, ex-UPTD persuteraan alam (Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo), atau pun Perum Perhutani.

2. Perbaiki sistem deteksi dini penyakit ulat sutra

Demi memastikan agar penyakit ulat sutra dapat terus terpantau dan terantisipasi, bibit yang kelak diproduksi atau diimpor perlu melewati tahapan deteksi dini secara berkala. Tujuan ini bisa dicapai lewat penyiapan infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan mekanisme untuk deteksi dini penyakit ulat sutra. Program-program yang dapat diselenggarakan sebagai berikut:

- ▶ Pengadaan laboratorium, SDM dan institusi pengelola untuk deteksi dini penyakit ulat sutra. Sarana-sarana ini dapat diadakan dan difungsikan lewat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae, Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo, dan Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng.
- ▶ Pengadaan pemantauan rutin dan sistem pelaporan cepat dan mudah akses (dari petani kepada petugas /penyuluh), untuk deteksi dini penyakit ulat sutra.

3. Penguatan kelembagaan petani.

Penguatan kelembagaan petani sangat dibutuhkan guna mengatasi rangkaian persoalan di dalam usaha tani, seperti peralihan komoditas, pengurangan penggunaan pestisida kimia, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kokon. Hal ini bisa dicapai lewat pendekatan pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) (Tand and Topatimasang 2003). Pendekatan pengorganisasian sekaligus dapat meningkatkan keterpaduan dalam program pendampingan petani, dan menguatkan kelembagaan petani dalam rangka perbaikan budidaya murbei dan ulat sutra. Sejumlah program dapat diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan kabupaten atau lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan ini:

- ▶ Pengorganisasian petani dalam rangka budidaya murbei dan pemeliharaan ulat sutra. Agar petani bisa secara kolektif membicarakan, mengatasi isu yang mereka hadapi, dan punya posisi tawar kuat. Dengan begitu, mereka akan bisa mengusahakan secara kolektif perbaikan kuantitas/kualitas kokon, harga kokon/benang yang rendah, menurunkan penggunaan pestisida, membuka akses terhadap deteksi

dini, serta mendapat dukungan pemerintah untuk semua upaya di atas. Pelatihan dan bimbingan teknis berlangsung setelah atau selama pengorganisasian yang biasanya melibatkan pengumpulan dan analisis data, sehingga jenis pelatihan /bimbingan maupun pesertanya mencerminkan 'sasaran' (isu dan pelaku) yang diperoleh dari data yang akurat.

- ▶ Pengadaan pendamping/ penyuluh.
- ▶ Peningkatan kapasitas kompetensi (termasuk sensitivitas terhadap isu gender dan inklusi sosial), dan insentif pendamping/ penyuluh.
- ▶ Fasilitasi kemitraan antara petani dengan pengusaha.

REFERENSI

Ploeg, Jan Douwe van der (2013), *Peasants and the Art of Farming: a Chayanovian manifesto*, Fernwood Publishing, Halifax and Winnipeg

Sadapotto, Andi (2010), *Penataan Institusi untuk Peningkatan Kinerja Persuteraan Alam di Sulawesi Selatan: Studi Komparasi di Enrekang, Soppeng dan Louding City, Cina*, Thesis, Bogor : Institut Pertanian Bogor

Tan, Jo Hann dan Roem Topatimasang (2003), *Mengorganisir Rakyat*, InsistPress, Yogyakarta.



Scan kode untuk
mengunduh materi ini

Penulis Policy Brief : Nurhady Sirimorok

Policy brief dirumuskan dari Laporan Kajian Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan yang dilaksanakan atas kerja sama Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Knowledge Sector Initiative (KSI), Yayasan BaKTI dan Payo-Payo.

Tim Pelaksana Kajian : Andi Sadapotto, Lusya Palulungan, Mahyuddin Riwu, Muhammad Alif K. Sahide, Nurhady Sirimorok, Syarif M. Parenreng dan Tim Peneliti Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan (Yvonne M. Salindeho, Andi Fitriyani Yahya, Alsry Mulyani, Rosmala Dewi Said, Yuliana Rauf, Yossi F. Pratama).